

Perhutani Siapkan Langkah Pemulihan Rancaupas

BANDUNG (IM) - Akibat rusaknya kawasan Rancaupas akibat event motor trail, PT Perhutani Alam Wisata, bakal melakukan pemulihan kondisi alam di kawasan tersebut.

Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat Banten, Asep Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pemulihan kerusakan lahan Rancaupas sejak Rabu 8 Maret 2023 lalu.

"Pada Rabu (8/3) bersama-sama dengan anggota Koperasi Edelwis yang merupakan mitra usaha di lokasi wisata Rancaupas dan pengingat lingkungan setempat, telah melakukan penanaman kembali tanaman Bunga Rawa untuk memulihkan ekosistem pasca kerusakan tersebut,"

ujar Asep, dalam keterangannya, Minggu (12/3). Untuk sementara ini, kawasan Rancaupas, dilakukan penutupan sementara waktu. Penutupan ini berlaku juga untuk kunjungan wisata.

"Penutupan operasional sementara Wana Wisata Rancaupas dari kunjungan wisatawan terhutang sejak tanggal 8 Maret 2023," ucapnya.

Nantinya, segala kegiatan dalam bentuk Trail dan Offroad di dalam Kawasan hutan selarang untuk dilaksanakan dengan adanya perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam petijinan pelaksanaan event.

"Perhutani juga terbuka bersinergi dengan semua pihak dalam kerangka pentahelix" ucapnya. ● pra

Polsek Sukaraja Diressmikan, Sekda Ingin Pelayanan Masyarakat Jadi Lebih Dekat



Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin Resmikan Polsek Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jumat (10/3/2023).

BOGOR (IM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, diresmikannya kantor Polsek Sukaraja yang baru, bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Sukaraja. Hal tersebut dikatakan saat mewakili Plt. Bupati Bogor pada peresmian kantor Polsek Sukaraja, Jumat (10/3).

Hadir pada peresmian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susanto, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, Camat Sukaraja, perwakilan Kodim 0621, jajaran Pemkab Bogor, Kapolsek dan Danramil, para alim ulama serta tokoh masyarakat setempat.

Mewakili Plt. Bupati Bogor, Burhanudin menuturkan, menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Bogor, dengan dukungan Ketua DPRD dan seluruh jajaran yang terkait, sehingga pembangunan kantor Polsek Sukaraja terealisasi.

Sebelumnya kantor Polsek Sukaraja masuk ke wilayah kota, sementara masyarakat yang dilayani adalah masyarakat Kabupaten Bogor.

"Lahan ini dulunya bekas kantor Kecamatan Kedunghalang, dan saya ikut mendorong lahan ini diserahkan ke Polres untuk dibangun Polsek Sukaraja. Ini luar biasa,

tahun 2022 lahan diserahkan ke Polres, tahun 2023 kantor Polsek Sukaraja sudah terbangun," ujar Burhanudin.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, menjelaskan, pembangunan Mapolsek Sukaraja berawal ketika ia berkeliling ke seluruh Polsek se-Kabupaten Bogor, termasuk ke Polsek Sukaraja yang lokasinya ada di wilayah Kota Bogor.

"Saya kemudian berdiskusi dengan Pemkab Bogor dan Ketua DPRD, saat itu juga semua sepakat memindahkan Polsek Sukaraja, ke wilayah Kecamatan Sukaraja," tandas AKBP Iman.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bogor, karena ini adalah tanah dari Pemkab. Kemudian kepada seluruh jajaran yang sudah mencurahkan pikiran tenaga dan materi, dalam pembangunan Polsek Sukaraja ini, semoga menjadi amal ibadah. Selanjutnya bisa lebih mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pesan saya kepada personil yang ditugaskan di Polsek Sukaraja, apa yang sudah diberikan ini sudah sangat luar biasa. Saya yakin bangunannya adalah yang terbaik diantara Polsek yang lainnya. Tantangannya, kita akan malu jika bangunannya sudah baik tapi pelayanannya kurang baik," ujar AKBP Iman. ● gio

THM Dilarang Keras Beroperasi Selama Bulan Puasa di Kab. Bogor

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan berbarkan surat edaran larangan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bogor beroperasi di bulan suci Ramadhan. Larangan itu dilakukan untuk menciptakan suasana ibadah puasa Ramadhan aman dan nyaman.

"Kami larang THM yang beroperasi di bulan Ramadhan, ini kami lakukan agar pelaksanaan puasa di Kabupaten Bogor berjalan dengan aman dan nyaman," tegas Iwan Setiawan.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 300.1/183/III/Sat.Pol.PP tentang kegiatannya dalam mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada Selasa, 7 Maret 2023.

Para Camat se-Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil melaksanakan patroli gabungan selama bulan Ramadhan pada jam rawan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum antara pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Para pengusaha rumah

makan, warung makan, dan sejenisnya selama bulan puasa diminta agar menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah.

Untuk mencegah terjadinya aksi tawuran pada jam berbuka puasa, setelah sholat tarawih dan saat sahur, tim gabungan Pemkab, polisi dan TNI segera membubarkan apabila terlihat ada kerumunan yang diduga berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Para pemilik usaha Tempat Hiburan Malam, Pengusaha Karaoke, Arena Bernyanyi dan sejenisnya, Panti Pijat dan sejenisnya, dilarang mengoperasikan usahanya selama Bulan Suci Ramadhan. Hal ini dalam rangka menjaga toleransi antar umat beragama selama Bulan Suci Ramadhan.

Iwan Setiawan juga meminta jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor untuk tegas dan menindak langsung jika ada pengusaha THM bandel yang tetap beroperasi saat puasa nanti.

"Saya minta Satpol PP untuk segera mendata ulang perizinan THM, baik izin bangunan ataupun izin operasionalnya," ujarnya. ● gio

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



AWAN PANAS GUGURAN GUNUNG MERAPI

Luncuran awan panas Gunung Merapi terlihat dari Srumbung, Magelang Jawa Tengah, Minggu (12/3). Menurut data BPPTKG pengamatan 12 Maret 2023 pukul 06:00 - 12:00 WIB terjadi 6 awan panas guguran dengan jarak luncur antara 1500 meter hingga 2500 meter ke arah barat daya.

Hindari Penyelewengan Dana BOS PAUD, Bapemperda Bentuk Perda

Masih banyak anak yang sudah pindah atau lulus dari PAUD dan sekolah di SD atau Madrasah Ibtidiyah masih mendapatkan dana BOS atas nama siswa maupun siswi yang sudah lulus tersebut. Itu salah satu tujuan membentuk Perda PAUD, untuk mencegah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana BOS di tingkat PAUD.

BOGOR (IM) - Untuk menghindari kerugian negara pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) Kabupaten Bogor akan membentuk peraturan daerah (Perda) PAUD.

Hal itu karena longgarnya aturan, hingga banyak anak yang sudah pindah atau lulus dari PAUD dan sekolah di SD atau Madrasah Ibtidiyah dikabarkan bahwa pihak pengelola PAUD masih mendapatkan dana BOS atas nama siswa maupun siswi yang sudah lulus tersebut.

"Salah satu tujuan kita membentuk Perda PAUD, kami bisa mencegah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana BOS di tingkat PAUD," kata anggota Tim Bapemperda Kabupaten.

Bogor Irman Nurcahyon kepada wartawan, Minggu (12/3).

Irman Nurcahyon menuturkan bahwa saat ini PAUD menjamur hingga di atas 2.000an karena perijinan operasionalnya cukup dari pemerintah kecamatan setempat.

"Dengan Perda PAUD, maka ijin operasional PAUD kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Kami ingin kurikulum PAUD distandarisasi," tutur Irman Nurcahyon.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini menerangkan, sewaktu masih dalam rancangan peraturan daerah (Raperda), Perda PAUD akan dibahas di panitia khusus (Pansus).

"Nanti Pansus DPRD

akan rapat bersama Dinas Pendidikan, kami akan bahas pasal per pasal termasuk muatan lokal dan standar kurikulum PAUD," terang politisi Partai Demokrat ini.

Irman menjelaskan selain PAUD, dengan Perda PAUD, Pemkab Bogor juga akan menertibkan ijin dan operasional bimbingan belajar anak, yang kebanyakan tidak memiliki ijin.

"Banyak bimbingan belajar, terutama yang frenchise atau waralaba yang tak berijin hingga diduga luput dari pungutan pegawai pajak hingga tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Irman. ● gio

Plt. Bupati Bogor akan Perkuat Sektor Pertanian

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, terus berupaya atas ketersediaan pangan, salah satunya beras, di Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani serta sebagai langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor.

Hal itu diterangkan Iwan Setiawan saat menerima Tim Penilai Set Impres terkait Usulan Penghargaan Satya Lancana (Inovasi Beras ASN), Ruang Rapat 1 Setda, Jumat (10/3/23).

Iwan Setiawan untkap, 90 ribu hektar atau 33 persen wilayah Kabupaten Bogor adalah lahan pertanian dan perkebunan.

Dengan wilayah yang cukup besar, ia memaksimalkan sektor pertanian tersebut untuk menjamin ketersediaan beras untuk masyarakat juga menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Bogor.

Program penguatan sektor pertanian juga tertuang dalam program Bogor Maju

salah satunya adalah beras segar asli Kabupaten Bogor dalam bentuk kemasan 5 kg yang diberi nama Carita Makmur.

Beras yang berasal dari berbagai gabungan kelompok petani di wilayah Kabupaten Bogor, lalu dikemas oleh Perumda Pasar Tohaga menjadi beras Carita Makmur.

"Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan Beras Di Kabupaten Bogor. Kami wajibkan

Seluruh ASN di Kabupaten Bogor diwajibkan membeli beras Carita Makmur melalui Peraturan Bupati. Kedeapan, selain ASN, masyarakat, non ASN juga bisa membeli beras Carita Makmur.

"Pemkab Bogor juga menjamin petani dengan asuransi Rp6 juta per hektar. Supaya bukan hanya memberi tapi juga menjaga kualitas dan keberlangsungan petani dengan jaminan. Seperti ketika kejadian bencana longsor di Bogor Barat, lahan pertanian yang rusak dan gagal



Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan Perkuat Sektor Pertanian, Jamin Ketersediaan Pangan Beras Di Kabupaten Bogor

panen akibat bencana sudah kami ganti melalui asuransi tersebut," terang Plt. Bupati Bogor.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah membuat suatu Perda yang namanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), jaminan bagi para petani untuk memper-

tahankan sawah abadi.

"Sawah abadi ini sudah dibuat Perda, kami juga membuat Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tersebar di berbagai wilayah," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan, Kolonel CAK Sandy mengatakan, inovasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang pertanian sangat bagus.

"Inovasi ini dianggap memenuhi syarat baik keaslian serta keberlanjutannya dan pantas kami usulkan sebagai calon penerima gelar tanda jasa dan penghargaan," pungkasnya. ● gio

Pemerintah dan Media Massa Harus Bersinergi dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Raker Kelompok Kerja Wartawan (Pokja) Kabupaten Bogor dilaksanakan selama dua hari Sabtu-Minggu (11-12/3) di Villa Evergreen Cisaruk Puncak Kabupaten Bogor. Acara tersebut dihadiri para pengurus dan anggota Pokja Kabupaten Bogor dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM) - Puncak Hari Pers Nasional (HPN) dan Raker Kelompok Kerja Wartawan (Pokja) Kabupaten Bogor dilaksanakan selama dua hari Sabtu-Minggu (11-12/3) di Villa Evergreen Cisaruk Puncak Kabupaten Bogor.

Acara tersebut dihadiri para pengurus dan anggota Pokja Kabupaten Bogor dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bogor.

Ketua pokja Kabupaten Bogor, EM Liswandi mengucapkan terimakasih ke-

pada seluruh anggota dan Dinas Kominfo Kab. Bogor bisa hadir dalam memenuhi undangan Pokja untuk acara Puncak HPN dan Raker Pokja.

Lebih lanjut Liswandi mengatakan, berbagai program yang dilakukan Pokja,

di antaranya ngariung Pancakarsa yang telah bergulir, dan tentunya pada tahun 2023 akan terus dilakukan dan menghadapi tahun politik berharap kepada seluruh anggota Pokja agar bermitra kepada para Calon legislatif (Caleg).

Program ini akan menjadi program baru Pokja wartawan Kab. Bogor.

Sementara Dina Nababan selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Media yang mewakili Kadis Diskominfo menyampaikan, untuk menghadapi era globalisasi dan IT serta menyikapi keterbukaan informasi saat ini, media massa maupun Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan dan memanfaatkan saluran komunikasi agar pesan dan informasi publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Menurutnya pemerintah dan media massa harus bersinergi dalam melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sekaligus

mengapresiasi acara puncak (HPN) dan (Raker) yang telah dilaksanakan pokja tahun 2023.

Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Bogor sebagai organisasi yang menghimpun profesi wartawan hendaknya terus berupaya menjadi wadah pengembang kapasitas dan insan pers yang kompeten.

Tidak hanya dalam hal profesionalisme jurnalistik dan penguasaan teknologi multimedia akan tetapi juga dalam menyikapi kebebasan pers dan menghindari penyalahgunaan profesi wartawan bagi kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kode etik wartawan.

Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan Raker Pokja Wartawan Kab. Bogor dan kami juga berharap Raker ini benar-benar mampu menghasilkan kebijakan dan program yang berkualitas yang bermanfaat bagi kemajuan Kab. Bogor kedepan, katanya. ● jay/gio